



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Ketahanan Pangan

Dalam Kerangka

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Harmonisasi Kebijakan & Program Aksi

Presentasi : Pemicu Diskusi II – Bp. Franky O. Widjaja

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
BIDANG AGRIBISNIS, PANGAN DAN KEHUTANAN
BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Oktober 2009

Latar Belakang

- ❑ Kenaikan harga pangan mengancam pemenuhan kebutuhan manusia yang paling dasar, meningkatkan instabilitas politik dan ekonomi, dan menghambat pengentasan kemiskinan di banyak negara. Menurut laporan *Food and Agriculture Organization (FAO)*, 923 juta penduduk dunia mengalami kekurangan pangan pada 2007, meningkat lebih dari 80 juta sejak periode 1990-1992.
- ❑ Tuntutan kebutuhan pangan dunia seyogyanya dapat mendorong negara produsen meningkatkan produksi, untuk memenuhi kebutuhan sendiri / swasembada pangan dan memasok kebutuhan pangan dunia. Kesempatan ini selayaknya dapat mendorong pemanfaatan potensi dan sumberdaya secara optimal.
- ❑ Untuk itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pemanfaatan produk pertanian untuk pangan dan energi.

Indonesia Memiliki PETANI Yang Terbaik serta Memiliki Potensi Besar di Bidang Pangan

- ❑ Indonesia sebagai negara agraris dan maritim: memiliki lahan pertanian yang luas, iklim dan curah hujan yang cocok dan tenaga kerja cukup. Indonesia juga memiliki pesisir pantai yang panjang (sekitar 81.000 km), lautan luas dan jenis ikan yang beragam.
- ❑ **PETANI** kita adalah petani yang terbaik, namun kita kalah dalam sisi infrastruktur, untuk itu Pemerintah Indonesia harus berani melakukan investasi secara besar-besaran di bidang Infrastruktur, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan produksi pertanian seperti irigasi, jalan, listrik, pelabuhan dll. Dengan demikian diharapkan produktivitas Petani akan meningkat dan lebih kompetitif.

Potensi Lahan dan Penerapan Forest Management

- ❑ Indonesia memiliki lahan seluas 188 juta hektar luas daratan, diantaranya terdiri dari 111 juta hektar areal kehutanan dan 77 juta hektar Areal Penggunaan Lain serta Areal Hutan Konversi. Dimana dari 188 juta hektar tersebut sekitar 100 juta hektar secara biofisik (fisiografi, bentuk wilayah, lereng dan iklim) cocok untuk kegiatan pertanian.
- ❑ Sebagian besar sumber daya lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pertanian maupun kehutanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Maka dari itu perlu penerapan **Forest Management yang baik dan konsisten.**
- ❑ Pemanfaatan areal hutan diprioritaskan pada areal-areal yang terlantar / yang sudah terbuka.

Potensi Pertanian dan Perikanan Memberikan Lapangan Kerja dan Devisa Yang Besar

- ❑ Penerimaan devisa enam komoditas andalan ekspor yaitu kelapa sawit, teh, kopi, kakao, udang, tuna diperkirakan mencapai **US\$ 101,5 Milyar selama periode 2010-2014**, dimana diantaranya US\$ 81 Milyar berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya.
- ❑ **Swasembada Sapi / Daging** yang diharapkan tahun 2014 merupakan komoditas andalan dalam memberikan lapangan kerja dan peningkatan gizi konsumsi masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi industri pengolahan
- ❑ Memperhatikan tingkat produksi saat ini, produksi pangan Indonesia masih dapat ditingkatkan menuju **swasembada pangan yang berkesinambungan**, sehingga **ketahanan pangan nasional menjadi lebih kokoh** serta dapat berperan lebih besar untuk **memenuhi kebutuhan pangan dunia**.
- ❑ **Diperlukan badan / lembaga** yang dapat melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** kebijakan yang **fokus, ringkas, jelas, tegas** dan **konsisten** terhadap kebijakan yang akan diambil maupun memantau kebijakan yang telah ada.

Quick Win Pointers

Area Kebijakan	Sasaran	Rencana Aksi
Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur	• Tersedia lahan cukup bagi perluasan areal pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.	▪ PerMen Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi (Ps 4 ayat (1)d);
	• Kepastian dan konsistensi peruntukan lahan (tidak berubah-ubah, konsisten antar instansi dan antara pusat dan daerah).	▪ Kep. Ka BPN No. 2/2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota;
	• Kemudahan proses pemanfaatan lahan untuk keperluan pengembangan kawasan komoditas pertanian.	▪ UU No.26 tahun 2007 dan PP No. 26 tahun 2008 mengenai Rencana tata Ruang Nasional
	• Kepastian dan jaminan atas hak kepemilikan tanah.	▪ UU No. 41/1999 tentang kehutanan dan perubahannya pada Perpu No.1/2004
		▪ BKPRN menyusun Perpu pengganti UU No.26/2007 dan UU No.41/1999 untuk sinkronisasi dan harmonisasi Tata Ruang Wilayah.

Quick Win Pointers

Area Kebijakan	Sasaran	Rencana Aksi
Pembiayaan dan Iklim Usaha / Investasi	Aturan perpajakan (PPN) yang kondusif bagi pembangunan sektor pangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyempurnaan / revisi / harmonisasi UU, PP, Permen dan peraturan perundangan berkaitan dengan PPN :<ul style="list-style-type: none">○ Restitusi dapat diajukan setiap bulan bagi semua wajib pajak tanpa pengecualian baik yang melakukan ekspor maupun yang tidak.○ Menyempurnakan KMK No.575 tahun 2000 sehingga pajak masukan bagi perusahaan di bidang pertanian / perkebunan yang terintegrasi: dapat dikreditkan sepanjang perusahaan melakukan proses lebih lanjut dari barang yang tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN sampai menghasilkan barang yang terutang PPN.

Quick Win Pointers

Area Kebijakan	Sasaran	Rencana Aksi
Teknologi / Akses Teknologi dan Diversifikasi Pangan	Tersedia dana memadai bagi kegiatan R&D, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none">▪ Insentif pajak bagi kegiatan penelitian (di bidang benih, teknik budidaya, dll) oleh swasta, sesuai PP No. 35 tahun 2007▪ Surat edaran Menteri keuangan (Juknis) untuk penggunaan langsung hasil kerja sama riset dalam rangka pelaksanaan PP No. 20 tahun 2005.
	Benih / Bibit dan saprotan lebih terjangkau	<ul style="list-style-type: none">▪ Penghapusan pajak dan bea masuk alsintan.
Kemaritiman	Ketertiban dan ketaatan hukum di daerah laut dan pantai	<ul style="list-style-type: none">▪ Membentuk satu lembaga pemerintah yang bertugas menenjaga dan menegakkan peraturan perundangan di daerah laut dan pantai (<i>SEA AND COAST GUARD</i>).



TERIMA KASIH

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
BIDANG AGRIBISNIS, PANGAN DAN KEHUTANAN
BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN**